

**ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UM KM) NGLARISI KOTA YOGYAKARTA**

LAPORAN MAGANG



Ditulis oleh:

Nama : Ichwan Mastito
Nomor Mahasiswa : 18311064
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Operasional

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) NGLARISI
KOTA YOGYAKARTA**

LAPORAN MAGANG

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir memperoleh gelar sarjana strata-1 di Program Studi Manajemen,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia



Ditulis oleh:

Nama : Ichwan Mastito

Nomor Mahasiswa : 18311064

Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Operasional

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Penulis,



Ichwan Mastito Hermawan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

*ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NGLARISI YOGYAKARTA*

Nama : Ichwan Mastito

Nomor Mahasiswa : 18311064

Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Operasional

Yogyakarta, 30 Mei 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh,

Dosen Pembimbing



Siti Nursyamsiah, Dra., MM., CMPM

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL
**ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NGLARISI YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **ICHWAN MASTITO HERMAWAN**
Nomor Mahasiswa : **18311064**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Kamis, 04 Agustus 2022

Penguji/ Pembimbing TA : Siti Nursyamsiah, Dra., M.M.



Penguji : Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

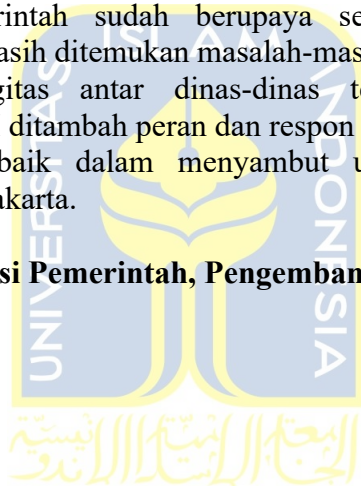


Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memiliki peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nglarisi Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, menggali data di lapangan dengan narasumber secara langsung dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui buku dan sumber lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan UMKM Nglarisi, sudah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, dalam pelaksanaannya sesuai indikator-indikator yang ada bisa dikatakan pemerintah sudah berupaya seoptimal mungkin dan siap memfasilitasi namun masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi karena masih belum adanya sinergitas antar dinas-dinas terkait yang terlibat dalam pengembangan UMKM ditambah peran dan respon dari pelaku UMKM itu sendiri yang masih kurang baik dalam menyambut upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta.

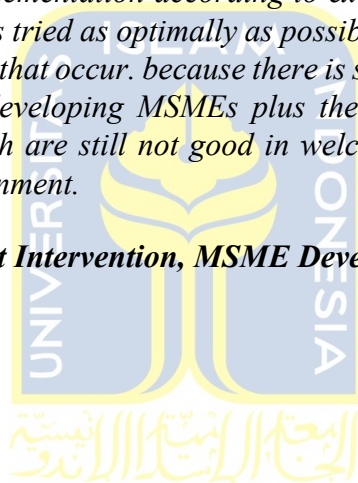
Kata Kunci : Intervensi Pemerintah, Pengembangan UMKM



ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are businesses engaged in various business fields that have an important role in society, because they can encourage the rate of economic growth and employment in an area. This study aims to determine the role of the Yogyakarta City Government towards the development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Nglarisi Yogyakarta. This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques through observation and interviews, digging data in the field with direct sources and documentation, namely collecting data through books and other sources. The results of this study indicate the role of the Yogyakarta City Government in the development of Nglarisi MSMEs, has carried out its role as a facilitator, regulator and catalyst, in its implementation according to existing indicators it can be said that the government has tried as optimally as possible and is ready to facilitate but there are still problems that occur. because there is still no synergy between related agencies involved in developing MSMEs plus the role and response of MSME actors themselves which are still not good in welcoming the efforts made by the Yogyakarta City Government.

Keywords: Government Intervention, MSME Development



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhannahu Wata'ala atas semua berkat dan karunia-Nya kepada penulis serta shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Tugas Akhir Magang di Badan Perencanaan Pmbangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta yang berjudul : **“Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nglarisi Kota Yogyakarta”** dengan baik serta tepat waktu.

Dengan selesainya laporan hasil Magang ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan, baik kepada materi maupun non- materi yang diberikan kepada penulis selama Magang berlangsung, secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rector Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi
3. Ibu Siti Nursyamsiah, Dra., MM. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai dosen pembimbing saya yang telah banyak sekali membantu dalam pengerjaan laporan tugas akhir magang dengan mencurahkan waktu sepenuhnya untuk membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dengan penuh kesabaran
4. Bapak Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Prodi Manajemen Program Sarjana yang sudah banyak membantu dan berkenan direpotkan atas urusan kegiatan magang ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Universitas Islam Indonesia

6. Orang tua penulis yang senantiasa mendukung penulis selama pelaksanaan magang dan menyusun laporan magang.
7. Kepada seluruh keluarga inti dan besar penulis yang selalu memberikan masukan dan dukungan.
8. Bapak Agus Tri Haryono, S.T., M.T. selaku Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
9. Bapak Sulisty Handoko, S.E. yang sudah menerima penulis sekaligus menjadi pembimbing selama magang
10. Bapak Agus Salim selaku pembimbing lapangan selama tugas observasi magang
11. Segenap jajaran kepegawaian Bappeda Kota Yogyakarta.
12. Kepada Ibu dan Alm. Ayah saya yang selalu menjadi alasan utama saya untuk menyelesaikan studi kuliah serta tugas akhir magang ini.
13. Kepada teman teman kelompok Tim Magang MBKM (Chillia Zhafirah, Olivia Ayu) yang sudah bersedia berjuang bersama dari awal magang sampai akhir magang dan kuliah.
14. Kepada teman teman kontrakan Tadika Mesra yang selalu memberi support dalam pengerjaan laporan akhir magang ini.
15. Sahabat penulis Farel, Tama, Kojay, Kojek, yang selalu menemani keluar nongkrong untuk mengerjakan laporan akhir magang ini.
16. Teman-teman kos, Tedi, Carya, Yona, Stephen, yang setiap hari membantu baik dari segi materi maupun non-materi.
17. Teman kampus penulis Imel, Aurora, Andra, Gifari, Faisal, dan semua pihak teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu
18. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Manajemen angkatan 2018.
19. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.

Segala usaha yang telah dilakukan oleh penulis untuk menyempurnakan tugas akhir ini namun Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih

jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Penulis juga berharap bahwa segala hal yang tertuang pada penulisan ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat selama proses penyusunan penulisan laporan tugas akhir magang ini.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.



DAFTAR ISI

ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Profil Kantor Dinas Bappeda Yogyakarta.....	1
1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta.....	2
1.3 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Bappeda Kota Yogyakarta.....	3
1.3.1. Visi.....	3
1.3.2. Misi.....	3
1.3.3. Tujuan Dinas Bappeda Kota Yogyakarta.....	3
1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Bappeda Kota Yogyakarta.....	4
1.4.1. Kedudukan Dinas Bappeda Kota Yogyakarta.....	4
1.4.2. Tugas Dinas Bappeda Kota Yogyakarta.....	4
1.4.3. Fungsi Dinas Bappeda Kota Yogyakarta.....	4
1.5 Latar Belakang Masalah.....	5
1.6 Rumusan Masalah.....	6
1.7 Tujuan Magang.....	7
1.7.1. Tujuan Umum Kegiatan Magang di Bappeda:.....	7
1.7.2. Tujuan khusus kegiatan magang di Bappeda:.....	7
1.8 Manfaat Magang.....	8
1.8.1 Secara Teoritis.....	8
1.8.2 Bagi perusahaan.....	8
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	9
2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	9
2.2 Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)	10
2.2.1 Pengertian Pengembangan Usaha.....	10
2.3 Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.3.1 Pengertian Peran	11
2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	12
2.3.3 Peran Pemerintah Daerah.....	14
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
3.1 Pendekatan Penelitian	16
3.2 Tujuan Penelitian	16
3.3 Lokasi Penelitian.....	16
3.4 Objek Penelitian.....	17
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.6 Unit Analisis	18
BAB IV	19
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN DISKUSI.....	19
4.1 Analisis Deskriptif Kualitatif.....	19
4.2 Deskripsi UMKM Gandeng Gendong	19
4.3 Kualifikasi Data UMKM Nglarisi	20
4.4 Hasil Analisa Penelitian.....	21
4.4.1 Penumbuhan Iklim Usaha.....	23
4.4.2 Penguatan Potensi atau Daya Usaha.....	29
4.4.3 Memberi Perlindungan Usaha	29
BAB V	30
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	30
5.1 Kesimpulan	30
5.1.1. Peran Pemerintah Daerah.....	30
5.2 Rekomendasi.....	31
5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.....	32
5.2.2 Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi	32

DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kualifikasi UMKM di Kemantren Kotagede	21
Tabel 4. 2 Kualifikasi UMKM di Kemantren Umbulharjo	21
Tabel 4. 3 UMKM di Kemantren Kotagede.....	22
Tabel 4. 4 UMKM di Kemantren Umbulharjo.....	23
Tabel 4. 5 UMKM Penerima Bantuan Modal Usaha	25
Tabel 4. 6 UMKM Tidak Menerima Bantuan Modal Usaha	25
Tabel 4. 7 UMKM Penerima Bantuan Alat Produksi	26
Tabel 4. 8 UMKM Tidak Menerima Bantuan Alat Produksi.....	27
Tabel 4. 9 UMKM Penerima Bantuan Pelatihan	28
Tabel 4. 10 UMKM Tidak Menerima Bantuan Pelatihan	29



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Struktur Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta	37
LAMPIRAN II Surat Permohonan Ijin Magang	38
LAMPIRAN III Daftar Nama Kelompok UMKM Nglarisi	39
LAMPIRAN IV Dokumentasi Wawancara & Observasi	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Kantor Dinas Bappeda Yogyakarta

Bappeda adalah instansi teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang ketuaai oleh kepala badan yang bertanggung jawab pada walikota melalui sekda. Misi utama badan tersebut adalah membantu walikota dalam mengelola pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong koordinasi pembangunan daerah, perlu ditingkatkan koordinasi antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka upaya menjamin laju, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif, terarah, dan terpadu.

Bappeda Kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah dimana mereka memiliki status, tanggung jawab, dan fungsi untuk berkontribusi terhadap Walikota Yogyakarta dalam mengemban misi dalam rencana penyelenggaraan pemerintah dalam mengimplementasikan berupa mengoordinir penyusunan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Dalam menjalankan perannya sebagai koordinator, Bappeda Kota Yogyakarta melakukan penyusunan terhadap berbagai tahapan kegiatan yang mana pemengku kepentingan terlibat dalam kegiatan tersebut dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Bappeda Kota Yogyakarta menyediakan produk perencanaan pembangunan serta informasi spasial kepada publik, dengan harapan perencanaan pembangunan kota Yogyakarta dapat dilaksanakan berbasis spasial.

1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta

1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

a) Kepala Badan;

b) Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

c) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri atas:

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Subbidang Inovasi Daerah; dan
3. Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah.

d) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
3. Subbidang Analisa Data Pembangunan.

e) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:

1. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Subbidang Pemerintahan; dan
3. Subbidang Pembangunan Manusia.

f) Bidang Perekonomian, terdiri atas:

1. Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;

2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
 3. Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- g) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
1. Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 2. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 3. Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Bappeda Kota Yogyakarta

1.3.1. Visi

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.”

1.3.2. Misi

Misi merupakan langkah atau cara yang dilakukan oleh suatu instansi guna tercapainya visi. Bappeda Kota Yogyakarta memiliki visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

1.3.3. Tujuan Dinas Bappeda Kota Yogyakarta

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, misi Bappeda Kota Yogyakarta adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas.

1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Bappeda Kota Yogyakarta

1.4.1. Kedudukan Dinas Bappeda Kota Yogyakarta

1. Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah
2. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

1.4.2. Tugas Dinas Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda mengemban tugas sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

1.4.3. Fungsi Dinas Bappeda Kota Yogyakarta

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan
3. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan penelitian, pengembangan inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah
5. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah
6. Pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
7. Pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian
8. Pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
9. Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan program kegiatan keistimewaan

10. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja
11. Penyelenggaraan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah
12. Penyelenggaraan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah
13. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Nyata
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan
16. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
17. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan
18. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan
19. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan
20. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

1.5 Latar Belakang Masalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta atau disingkat Bappeda Kota Yogyakarta bertugas mendukung terselenggaranya urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan pendampingan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Bappeda Kota Yogyakarta memiliki 5 bidang, yaitu Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Pemerintah dan Manusia, Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Di zaman modern ini, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memegang peranan penting dalam hal meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, termasuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan UMKM yang terstruktur merupakan salah satu pondasi penting bagi pengembangan UMKM dan promosi pembangunan ekonomi daerah. Saat ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Yogyakarta berkembang pesat dan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah yang dimulai dari industri lokal. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta sangat penting karena melalui UMKM dapat menciptakan kawasan usaha dan lahan baru bagi kehidupan masyarakat di berbagai sektor ekonomi Kota Yogyakarta. Dengan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat meminimalisir tingkat pengangguran di Yogyakarta. Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberdayaan pekerja masyarakat dimaksimalkan, dan perekonomian daerah yang dapat ditumbuhkan UMKM tersebut juga terbantu.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan, pendanaan/pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usahanya agar lebih dinamis. Penyuluhan informasi cara pengelolaan usaha sangat diperlukan bagi peserta UMKM, namun masih sulit dilakukan.

Untuk mendorong para pelaku UMKM agar menghasilkan produk yang tepat serta berkualitas. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi penelitian juga hampir keseluruhan kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan untuk itu keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan guna memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan dengan mereka.

1.6 Rumusan Masalah

Dalam konteks laporan magang , pemberdayaan UMKM di Yogyakarta bukanlah menjadi sesuatu yang asing, upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan pelatihan, pendampingan, pembinaan serta perkuatan modal usaha guna mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun realitanya fakta bahwa belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi daerah lain yang ada di Kota Yogyakarta, selanjutnya terdapat berbagai masalah belum meratanya peran pemerintah daerah terkait bantuan pelatihan, pendampingan, pembinaan, serta perkuatan modal usaha bagi para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam rumusan masalah ini d2itetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nglarisi di Kota Yogyakarta?

1.7 Tujuan Magang

Mengacu pada kurikulum Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia, mahasiswa wajib melakukan kerja lapangan/penelitian dengan mencari dan mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang dilaksanakan sebagai tugas akhir mahasiswa. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah:

1.7.1. Tujuan Umum Kegiatan Magang di Bappeda:

- 1) Mengimplementasikan ide serta ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan.
- 2) Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja lebih cepat dan profesional.
- 3) Memperoleh pengalaman kerja yang menjadi nilai tambah (*added value*) bagi mahasiswa.

1.7.2. Tujuan khusus kegiatan magang di Bappeda:

- 1) Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nglarisi.

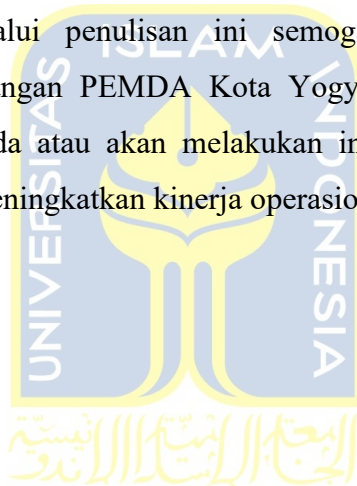
1.8 Manfaat Magang

1.8.1 Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mempelajari dan mengimplementasikan pembelajaran terkait intervensi pemerintah dalam sistem Nglarisi.

1.8.2 Bagi perusahaan

Melalui penulisan ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan PEMDA Kota Yogyakarta atas strategi yang sudah ada atau akan melakukan intervensi pemerintah agar dapat meningkatkan kinerja operasional.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda untuk setiap dokumen. tidak hanya tergantung pada undang-undang, tetapi juga pada berbagai otoritas dan lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM diartikan sebagai:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi standar usaha mikro menurut Undang-Undang ini..
2. Usaha kecil adalah entitas yang jelas dan produktif yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan menengah atau besar yang memenuhi standar bisnis Klein, atau dioperasikan oleh individu atau entitas yang bukan merupakan anak perusahaan dari anak perusahaan tersebut atau afiliasi dari anak perusahaan tersebut. Perusahaan ekonomi. Arti dari hukum ini.
3. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang berdiri sendiri, produktif, komersial yang dikendalikan oleh orang pribadi atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan kecil atau menengah atau perusahaan besar yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagiannya.

Menurut aset dan penjualan berdasarkan Pasal 20 dan 6 UU 2008, standar untuk usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih kurang dari Rp50.000.000,00 (Rp50 juta). Namun, tanah dan bangunan untuk penggunaan bisnis tidak termasuk atau

2. Penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (300 juta rupiah).

Sedangkan Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, kekayaan bersih berkisar antara Rp 50.000.000 (Rp 50 juta) sampai dengan Rp 500 juta (Rp 500 juta); atau
2. Penjualan tahunan melebihi 300 juta rupiah (300 juta rupiah), sampai dengan 2.500.000.000,00 rupiah (2 miliar rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih melebihi Rp 500 juta (Rp 500 juta), sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha); atau
2. Penjualan tahunan berkisar dari Rp250.000.000,00 (Rp2 miliar) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Rp50 miliar).

2.2 Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha dari usaha itu sendiri agar usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi untuk dapat mencapai puncak atau menuju kesuksesan. Pengembangan bisnis dilakukan oleh perusahaan yang telah memulai proses dan tampaknya memiliki banyak potensi untuk tumbuh atau berkembang.

Menurut Brown dan Petrello (1976) pengembangan bisnis terdiri dari organisasi yang memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, organisasi perusahaan juga mendorong pengembangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghasilkan keuntungan.

Anoraga (2007:66) menjelaskan bahwa, pengembangan usaha merupakan tanggung jawab semua pengusaha dan memerlukan kejelian, motivasi dan kreativitas.. Jika hal ini bisa dilakukan oleh setiap

pengusaha, besar harapannya agar usaha kecil bisa bertransformasi menjadi usaha menengah bahkan menjadi usaha besar.

Oleh sebab itu, kami menyimpulkan bahwa pengembangan bisnis adalah tanggung jawab semua pengusaha dan organisasi yang menghasilkan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. dan untuk itu diperlukan kejelian, motivasi, dan kreativitas untuk mengembangkan dan mengembangkan usaha tersebut.

Usaha dapat dimulai dari pendirian suatu usaha, membentuk persekutuan atau mengakuisisi usaha orang lain atau yang dikenal dengan waralaba. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah kemana bisnis akan membawa Anda. Maka pengembangan diperlukan untuk menumbuhkan dan menopang bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan usaha dengan sukses, diperlukan dukungan dalam berbagai aspek, seperti produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain..

2.3 Peran Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Peran

Peran akal sehat dapat dipahami sebagai tindakan seseorang terhadap tanggung jawab. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (keadaan).

Menurut Sedarmayanti (2004:33), peran adalah platform kognitif yang digunakan oleh semua manusia yang berinteraksi dalam suatu organisasi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Soekanto (2002:243), peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Mereka memiliki peran sebagai orang yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya..

Pariata Westra dalam (Tuti 2003:9) menyatakan bahwa peran dapat dipahami sebagai melakukan suatu fungsi atau tugas yang berkaitan dengan suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan..

Penafsiran lain diberikan oleh Mayor Palak (Tuti 2003:9) yang mengemukakan bahwa: “Peran adalah perilaku yang diharapkan individu dalam hubungan sosial tertentu dalam hubungannya dengan kedudukan sosial tertentu”.

Dalam istilah manajerial, peran merupakan harapan perilaku yang sesuai dari orang-orang yang memegang posisi tertentu dalam organisasi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan tugas.

2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Nuramelia (2014:07) menjelaskan pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan di beberapa daerah yang dikuasainya. Pemerintah secara umum didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang memiliki misi untuk mengarahkan departemen administratif, legislatif, dan yudikatif dari suatu pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu kelompok yang menjalankan kebijakannya sendiri untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan sistem pemerintahan.

Menurut Fatih (2014:13), pemerintah ialah organisasi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang tertentu.

Fatih (2014:13) mendefinisikan pemerintah dengan kegiatan sistematis yang melibatkan rakyat/penduduk berdasarkan negara dan kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk itu sendiri..

Pengertian pemerintah dalam konteks luas merupakan seluruh aparatur negara, khususnya pejabat tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA dan BPK). Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah presiden dan jajaran/aparat lain dalam lembaga eksekutif atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan kewajiban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahannya menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional. Peningkatan, pelayanan, dan pemberdayaan. Meningkatkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan keunikan daerah dalam demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan dan sistem kesatuan .

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai bagian dari badan organisasi pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada dalam wilayah hukum daerah otonom. Pada saat yang sama, pemerintah daerah merupakan pemerintahan koalisi berdasarkan prinsip otonomi maksimum dalam sistem. Prinsip-prinsip persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian pemerintah daerah di atas, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah di sini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah otonom melalui pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas desentralisasi, dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur, bupati, walikota, dll.

2.3.3 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam pemberdayaan adalah membimbing masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan tanpa paksaan dari masyarakat. Harus ada peran pemerintah yang optimal dan mendalam dalam membangun masyarakat agar peran pemerintah yang dimaksud terkandung di dalamnya.:

1) Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai badan pengatur adalah menyiapkan arah yang seimbang bagi pelaksanaan pembangunan dengan menjadikannya sebagai badan pengatur. Pemerintah membekali masyarakat dengan acuan dasar sebagai alat untuk mengatur berbagai persoalan berdasarkan praktik pemberdayaan.

2) Pemerintah sebagai Dinamisator

Jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan, peran pemerintah adalah melibatkan masyarakat untuk mendorong dan mendukung dinamika pembangunan daerah.

Peran pemerintah adalah memberikan insentif dan nasehat serta bimbingan yang efektif kepada masyarakat. Biasanya, saran diberikan oleh sekelompok penyuluh atau beberapa organisasi pelatihan..

3) Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam hal ini pemerintah diartikan sebagai fasilitator dimana pemerintah mampu memberikan situasi yang kondusif terhadap pelaksanaan pembangunan guna menengahi berbagai kepentingan pada masyarakat masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai perantara, pemerintah memberikan dukungan di bidang keuangan atau permodalan melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan

keterampilan dan dengan memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat yang memiliki izin.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian di mana peneliti mempelajari keadaan alami suatu subjek, yang merupakan sarana utama untuk belajar. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah dimulai dengan data, menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan diakhiri dengan teori. Penelitian ini hanya bersifat deskriptif, karena peneliti disini mencoba untuk mendokumentasikan, menganalisis dan mendeskripsikan realitas bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan, dan hanya tinggal di Nglarisi di kota Yogyakarta..

3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena sedalam mungkin dengan mengumpulkan data yang terdalam dan menunjukkan kedalaman dan pentingnya rincian data yang disurvei. Semakin dalam, lebih teliti, dan semakin terdali data dari studi kualitatif, semakin memudahkan untuk memaknai kualitas penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif lebih mengutamakan kedalaman data daripada volume data dan kurang tepat sasaran dibandingkan penelitian kuantitatif dalam hal responden atau jumlah responden..

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pencarian adalah lokasi atau area di mana pencarian dilakukan. Positioning dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja, berdasarkan permasalahan penelitian ini. Dari penjelasan latar belakang masalah

tersebut, penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) minggu dari tanggal 16 November sampai dengan 27 November 2021. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kemantren Kotagede dengan jumlah lima UMKM dan Kemantren Umbulharjo dengan jumlah lima UMKM sehingga dipilihlah dua Kemantren tersebut sebagai tempat penelitian dari penelitian ini.

3.4 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 19), tujuan penelitian adalah tujuan ilmiah memperoleh data untuk tujuan tertentu, menggunakannya untuk masalah objektif, valid dan dapat diandalkan (variabel spesifik) pada subjek meningkat.

Data penelitian yang dilakukan, objek penelitian yang diteliti yaitu Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Terhadap UMKM Nglarisi. Sedangkan subjek dalam laporan magang ini adalah UMKM, yang berlokasi di Kemantren Kotagede dengan jumlah lima UMKM dan Kemantren Umbulharjo dengan jumlah lima UMKM.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang tepat diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan secara empiris dalam penelitian ini. Dengan data yang diperoleh tersebut maka peneliti dapat mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian sosial di lapangan serta melakukan analisa menggunakan berbagai teori yang sesuai dengan subjek tersebut.

Creswell (2009) menjelaskan terdapat langkah atau tahapan yang harus dilewati peneliti dalam pengumpulan data yakni upaya membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, penataan dan tidak terstruktur, dan dokumentasi Creswell (2013:266). Dalam penelitian kualitatif ini, kami menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi kualitatif adalah melakukan penelitian di mana seorang peneliti pergi langsung ke fasilitas penelitian dan mengamati perilaku dan aktivitas orang-orang di fasilitas penelitian. Dalam observasi ini, peneliti menangkap atau menangkap secara terstruktur dan semi terstruktur dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang benar-benar ingin diketahui peneliti (Creswell, 2013:266).

2. Wawancara

Pengertian wawancara menurut (Moleong, 2011:186) adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang menjawab pertanyaan.

Teknik pengumpulan data dengan memahami fenomena dan kondisi lapangan serta pertanyaan sistematis atau wawancara mendetail dengan pihak-pihak yang terkait dengan subjek yang diteliti untuk menyempurnakan data peneliti.

Teknik Pengumpulan data melalui pertanyaan atau wawancara mendetail yang memahami fenomena dan situasi di lapangan dan dilakukan secara sistematis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian untuk menyempurnakan data peneliti.

3. Studi Pustaka

Mengumpulkan data dari sejumlah buku dan jurnal sastra yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang dapat digunakan sebagai referensi pendukung dalam berkarya..

3.6 Unit Analisis

Unit analisis dalam laporan ini adalah desain yang terkait dengan aspek teknis dan non teknis Nglarisi Jogja, yaitu UMKM anggota Nglarisi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bagian ini dipilih karena sesuai dengan tema penulis yaitu analisis intervensi pemerintah terhadap pengembangan UMKM Nglarisi di kota Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN DISKUSI

4.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif dalam pelaksanaan Tugas Akhir Magang ini menyajikan deskripsi UMKM Gandeng Gendong, kualifikasi data pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Hasil Analisa Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga dapat dijadikan bahan penulisan laporan Tugas Akhir Magang.

4.2 Deskripsi UMKM Gandeng Gendong

Gandeng Gendong dibentuk pada tahun 2018 dan secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada bulan April 2018. Program Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan UMKM serta mempercepat upaya pengetasan kemiskinan salah satunya diwujudkan dalam program Gandeng Gendong. Program Gandeng Gendong diawali dengan kata “gendong” yang artinya pemerintah bertanggung jawab membantu, mendukung dan mengarahkan pelaku UMKM agar dapat beroperasi dan berkembang di masa yang akan datang. Ketika pelaku UMKM dapat beroperasi secara mandiri dan mulai berkembang, pelaku UMKM akan “dimasukkan” sebagai mitra pemerintah kota..

Dalam program tersebut terdapat 5 komponen yang saling terlibat yaitu Kampus, Korporasi, Masyarakat, Kota dan Desa, serta melibatkan seluruh elemen pembangunan yang ada. administrasi masing-masing. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program Gandeng Gendong memiliki visi kebersamaan, solidaritas, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta memiliki misi yaitu menanamkan

nilai-nilai etika gotong royong, saling gotong royong, memperoleh koperasi dan meningkatkan *stakeholder*.

4.3 Kualifikasi Data UMKM Nglarisi

Terdapat sepuluh UMKM Nglarisi yang dilakukan penulis, di mana sepuluh UMKM tersebut terbagi menjadi 2 daerah kemantren yaitu Kemantren Kotagede yang berjumlah lima Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Kemantren Umbulharjo yang berjumlah 5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai tabel berikut :

Tabel 4. 1 Kualifikasi UMKM di Kemantren Kotagede

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Kelurahan	Sektor Usaha
1.	Winda Titi P	Teratai Food	Prenggan	Catering Nasi dan Snack
2.	Martini	UPPKS Ceria	Prenggan	Catering Nasi dan Snack
3.	Bardan Al Khuri	Agro 12	Rejowinangu n	Catering Nasi dan Snack
4.	Woro Darmini	Sangga buwana	Rejowinangun	Catering Nasi dan Snack
5.	Sumiyati	Srikandi Mataram	Purbayan	Catering Nasi dan Snack

Tabel 4. 2 Kualifikasi UMKM di Kemantren Umbulharjo

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Kelurahan	Sektor Usaha
1.	Iis Siti Sutiani	Melati	Giwangan	Catering Nasi dan Snack
2.	Windarsih Hadi	Barokah	Giwangan	Catering Nasi dan Snack
3.	Suginah	Pandan Wangi	Pandeyan	Catering Nasi dan Snack
4.	Purwani Prihatin	Sidikan Raya	Pandeyan	Catering Nasi dan Snack
5.	Nur Cahyati	PSA	Pandeyan	Catering Nasi dan Snack

4.4 Hasil Analisa Penelitian

Penelitian ini dilakukan tanpa memisahkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk tujuan perbandingan dan penelitian. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk membuat perbandingan topik penelitian yang tidak terpisahkan, yaitu analisis intervensi pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tanah air Nglarisi di kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berlokasi di Kemantren Kotagede dengan jumlah lima UMKM dan Kemantren Umbulharjo dengan jumlah lima UMKM, antara lain sebagai tabel berikut:

Tabel 4. 3 UMKM di Kemantren Kotagede

No.	Nama UMKM	Kelurahan
1.	Teratai Food	Prenggan
2.	UPPK Ceria	Prenggan
3.	Agro 12	Rejowingungun
4.	Sanggabuwana	Rejowinangun
5.	Srikandi Mataram	Purbayan

Tabel 4. 4 UMKM di Kemantren Umbulharjo

No.	Nama UMKM	Kelurahan
1.	Melati	Giwangan
2.	Barokah	Giwangan
3.	Pandan Wangi	Pandeyan
4.	Sidikan Raya	Pandeyan
5.	PSA	Pandeyan

Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Kota Yogyakarta telah melakukan upaya dalam mengembangkan UMKM berdasar pada Undang Undang Nomor 20 pasal 1 ayat 8 dan 9 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Upaya dalam mengembangkan UMKM tersebut dapat dibagi secara umum menjadi tiga peran yaitu, antara lain:

- A. Penumbuhan, iklim. usaha,
- B. Penguatan. potensi atau daya usaha.
- C. Memberikan perlindungan usaha.

4.4.1 Penumbuhan.Iklm Usaha.

Pertumbuhan iklim usaha dicapai dengan memberikan dukungan dalam bentuk dana tunai, memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pembinaan untuk memfasilitasi pendanaan bank/swasta serta dukungan dalam hal sarana dan prasarana bagi anggota UMKM. Dari sepuluh UMKM Kemantren Kotagede dan Kemantren Umbulharjo seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat ketidakmerataan baik bantuan berupa tunai maupun non-tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Kegiatan penumbuhan lingkungan usaha atau pengembangan UMKM Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tujuan yang jelas dan perlu dilaksanakan. Untuk memahami peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di Nglarisi, Yogyakarta, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan UMKM. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan mendapat informasi dari Nglarisi tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM :

1. Bantuan Tunai (Modal Usaha)

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait dalam upaya mendukung serta mengembangkan kegiatan pelaku UMKM dengan memberikan bantuan modal usaha. Pemberian bantuan modal bagi para pelaku UMKM bertujuan untuk menaikkan produksi dengan memilih bahan baku berkualitas tinggi dan menambah jumlah pekerja, sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selain itu hibah modal usaha telah diberikan untuk mendanai sarana dan prasarananya. Memiliki sarana dan prasarana yang baik memudahkan aspek-aspek perbaikan lainnya. Beberapa anggota UMKM menerima hibah usaha yang digunakan untuk meningkatkan arus kas perusahaan. Dalam hal

ini, subsidi perusahaan akan digunakan sebagai cadangan untuk mengamankan agunan berupa dana perusahaan jika diperlukan tanggapan di kemudian hari. Namun, ada beberapa pejabat UMKM yang tidak terbantu dengan dana proyek yang diberikan oleh Kota Yogyakarta.

Terdapat lima UMKM yang menerima bantuan modal usaha, yaitu di antaranya berjumlah tiga di Kemantren Umbulharjo dan berjumlah dua di Kemantren Kotagede, seperti tabel berikut :

Tabel 4. 5 UMKM Penerima Bantuan Modal Usaha

No.	Nama UMKM	Kemantren	Dinas Terkait	Senilai
1.	UPPKS Ceria	Kotagede	BUPN	Rp.1.200.000
2.	Srikandi Mataram	Kotagede	Bank Jogja	Rp.8.000.000
3.	Melati	Umbulharjo	Dinas Koperasi	Rp.2.400.000
4.	Pandan Wangi	Umbulharjo	Dinas Koperasi	Rp.2.400.000
5.	PSA	Umbulharjo	Provinsi Germas	Rp.300.000

Terdapat lima UMKM yang tidak menerima bantuan modal usaha, yaitu di antaranya berjumlah tiga di Kemantren Kotagede dan berjumlah dua di Kemantren Umbulharjo, seperti sebagai tabel berikut :

Tabel 4. 6 UMKM Tidak Menerima Bantuan Modal Usaha

UMKM Tidak Menerima Bantuan Modal Usaha		
No.	Nama UMKM	Kemantren
1.	Teratai Food	Kotagede
2.	Agro 12	Kotagede
3.	Sanggabuwana	Kotagede
4.	Barokah	Umbulharjo
5.	Sidikan Raya	Umbulharjo

2. Bantuan Non-Tunai (Alat Produksi)

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait senantiasa mendorong serta menumbuhkan kekuatan kepada para pelaku UMKM. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa alat produksi hingga proses penunjang produksi. Dukungan yang diberikan tentunya sangat membantu para anggota UMKM untuk mempercepat produksinya dan output yang akan dihasilkan sebagai produk komersial bagi anggota UMKM yang berdaya saing.

Terdapat empat UMKM yang menerima bantuan berupa alat produksi yang mana berjumlah tiga di antara nya di Kemantren Umbulharjo dan satu di Kemantren Kotagede, seperti tabel berikut :

Tabel 4.7 UMKM Penerima Bantuan Alat Produksi

No.	Nama UMKM	Kemantren	Dinas Terkait	Bantuan Alat
1.	Sangga buwana	Kotagede	Dinas Pariwisata	Panci dan Wajan
2.	Melati	Umbulharjo	PEW	Magic Com dan Alat Presto
3.	Pandan Wangi	Umbulharjo	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Aneka Kemasan
4.	PSA Pandeyan	Umbulharjo	Dinas Koperasi	Kompas, Panci, Alat Penggorengan, Wajan, dan Piring

Terdapat enam UMKM yang tidak menerima bantuan berupa alat produksi yaitu tiga di antara nya di Kemantren Umbulharjo dan tiga di Kemantren Kotagede, seperti tabel berikut :

Tabel 4.8 UMKM Tidak Menerima Bantuan Alat Produksi

No.	Nama UMKM	Kemantren
1.	Teratai Food	Kotagede
2.	Agro 12	Kotagede
3.	UPPKS Ceria	Kotagede
4.	Srikandi Mataram	Umbulharjo
5.	Barokah	Umbulharjo
6.	Sidikan Raya	Umbulharjo

3 Bantuan Pelatihan, Pembinaan, dan Pendampingan

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk membuat pertumbuhan suatu perusahaan. Pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui instansi terkait dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan minimal setahun sekali kepada para anggota UMKM..

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bantuan pelatihan, ditemukan bahwa rata-rata para pelaku UMKM sudah menerima bantuan berupa pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan hanya beberapa pelaku UMKM yang tidak menerima bantuan berupa pelatihan, pembinaan, pendampingan.

Terdapat tujuh UMKM yaitu di antara dua di Kemantren Kotagede dan lima di Kemantren Umbulharjo yang sudah menerima bantuan berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, seperti tabel berikut :

Tabel 4. 9 UMKM Penerima Bantuan Pelatihan

UMKM Penerima Bantuan Pelatihan				
No.	Nama UMKM	Kemantren	Dinas Terkait	Bentuk Pelatihan
1.	Sangga buwana	Kotagede	Kecamatan & Kelurahan, Dinas Pariwisata	Pelatihan membuat masakan ikan, Pelatihan Manajemen
2.	Srikandi Mataram	Kotagede	Dinas Perindustrian & Perdagangan, KPMP	Pelatihan Masakmasak, Pelatihan Manajemen, Pelatihan Kewirausahaan
3.	Melati	Umbulharjo	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Pelatihan Pembukuan & Pemasaran Produk
4.	Barokah	Umbulharjo	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Membuat Masakan Kacang Telur dan Kue Kering
5.	Pandan Wangi	Umbulharjo	Dinas Koperasi, Dinas Industri & Pertanian, dan Dinas Perikanan	Pelatihan Pengemasan & Foto Produk <i>Ecommerce</i> , Pelatihan Ketahanan Pangan, Pelatihan Pengolahan Ikan
6.	PSA Pandeyan	Umbulharjo	Provinsi Germas	Pelatihan Masak
7.	Sidikan Raya	Umbulharjo	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Pelatihan Pembuatan Kue.

Terdapat tiga UMKM di Kemantren Kotagede yang tidak menerima bantuan berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, seperti tabel berikut :

Tabel 4. 10 UMKM Tidak Menerima Bantuan Pelatihan

UMKM Tidak Menerima Bantuan Pelatihan		
No.	Nama UMKM	Kemantren
1.	Teratai Food	Kotagede
2.	Agro 12	Kotagede
3.	UPPKS Ceria	Kotagede

4.4.2 Penguatan Potensi atau Daya Usaha

Memperkuat potensi sumber daya perusahaan melalui pengembangan pada produksi dan pengolahan, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, desain dan teknologi. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dan merata.

4.4.3 Memberi Perlindungan Usaha

Sementara itu, upaya memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat atau tidak sehat telah menjadi perhatian pemerintah kota Yogyakarta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dari segi hukum, keamanan dan keselamatan, integritas dan persaingan tidak sehat. Perlindungan usaha ini tidak hanya berlaku dalam keadaan normal, tetapi juga berlaku pada saat terjadi kerugian, sehingga meminimalkan kebangkrutan usaha.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari studi yang disajikan dan dianalisis pada bab sebelumnya, dan deskripsi dari data, dalam bab ini peneliti melengkapi serangkaian hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Peneliti juga membuat rekomendasi yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk kelompok kepentingan dan penelitian lainnya..

5.1 Kesimpulan.

5.1.1. Peran.Pemerintah.Daerah.

Secara umum, peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data wawancara sebagai berikut:

5.1.1.1 Peran.Pemerintah.sebagai Fasilitator.

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta melalui instansi atau unit terkait sebagai koordinator, telah memberikan fasilitas untuk memberdayakan atau mengembangkan UMKM Nglarisi, namun ada program, kebijakan atau lembaga pelatihan dan pelatihan yang efektif dan tidak efektif, baik dalam kinerja maupun hasil serta dampak yang kurang optimal karena belum tepat sasaran dan tidak merata.

5.1.1.2 Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui dinas atau instansi terkait telah melaksanakan peran sebagai regulator guna mendongkrak keberadaan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi itu sendiri dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011, peraturan tersebut

mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu pemerintah daerah Kota Yogyakarta telah melakukan tiga upaya dalam mengembangkan atau memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Nglarisi, yaitu:

- 1) Upaya pemberdayaan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha
- 2) Upaya pengembangan dalam bentuk pemberian fasilitas, bimbingan dan pendampingan

Tetapi masih terdapat beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi yang belum mendapatkan bantuan berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan sehingga peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai regulator masih belum dapat dikatakan optimal.

5.1.1.3 Peran.Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui dinas atau instansi terkait telah menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti memberikan program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. Pelatihan tersebut berupa pemberian materi mengenai cara pengolahan makanan dengan berbagai macam bahan baku hingga program pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan pembukuan & pemasaran produk, tetapi masih terdapat beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi yang belum mendapatkan program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, yang menyebabkan peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta masih belum dapat dikatakan optimal serta belum merata.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan sub bab sebelumnya, khususnya sub bab penutup tentang peran pemerintah kota Yogyakarta, peneliti memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk beberapa bagian terkait dengan pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro Nglarisi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta disini sebagai pemegang pemerintah pusat harus berperan lebih optimal dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi khususnya di Kemantren Kotagede dengan jumlah lima UMKM dan Kemantren Umbulharjo dengan jumlah lima UMKM, mengingat dua Kemantren tersebut memiliki potensi yang lebih. Peran pemerintah disini diharapkan lebih intens terjun langsung kepada para pelaku UMKM atau sering mengadakan review, audiensi dan lain-lain agar program ke depan dapat tepat sasaran, efisien dan efektif.

Hal-hal yang perlu dikaji oleh Pemkot Yogyakarta mengenai pemasaran, mengingat Kementerian Kotagede dan Umbulharjo Kemantren memiliki potensi, maka Pemkot Yogyakarta perlu lebih inovatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam upaya membantu pemasaran produk oleh Aktor Nglarisi UMKM. karena rata-rata agen mengeluh Pemkot Yogyakarta tidak maksimal membantu memasarkan produknya.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan, dari data tersebut selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk tujuan yang telah ditetapkan di awal dan juga dapat digunakan dalam program ke depan, seperti pemberdayaan di Kemantren Kotagede dan Kemantren Umbulharjo perlu dilakukan secara intens karena masih belum seoptimal Kemantren di daerah lain.

5.2.2 Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nglarisi

Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dijadikan sasaran utama dalam upaya Pemkot Yogyakarta memberdayakan UMKM juga berperan penting dalam keberhasilan pemberdayaan hak-hak UMKM. Keberhasilan pemberdayaan ini juga tidak terlepas dari respon dan semangat para pelaku UMKM dalam merayakan upaya pemerintah dalam menjalankan peran dan kewenangannya.

Pelaku UMKM perlu lebih semangat dalam membantu pemerintah kota Yogyakarta agar nantinya bisa menghasilkan program yang efektif dan efisien. Dari respon yang positif dan baik, juga akan bermuara pada sinergi antara pelaku UMKM dengan Pemkot Yogyakarta.

Respon positif dan baik di sini dapat dicapai melalui forum atau review yang dilakukan oleh anggota UMKM untuk membahas kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Hasil ini kemudian dapat dipresentasikan kepada pemerintah daerah oleh perwakilan anggota UMKM untuk komunikasi yang baik antara anggota UMKM dan pemerintah.

Selain berkomunikasi dengan pemerintah untuk menciptakan sinergi, para pelaku UMKM perlu mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan dan kemajuan UMKM itu sendiri, memaksimalkan keduanya, hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Program dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagai pemberdayaan hanya akan efektif jika Pelaku UMKM sendiri melakukan dan merespon peran dan layanan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- Al Kautsar, M. N. (2021). *Perbaikan Model Bisnis Program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta Menggunakan Metode Service-Dominant Business Model Radar (SDBM/R)*. Universitas Islam Indonesia.
- Ambarawati, R., & Supardi. (2021). *Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Operasional_dan_Implementasi_d/HYgkEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=manajemen+operasional&printsec=frontcover
- Anoraga, P. (2007). *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ariani, D. W. (2017). *Manajemen dan Strategi Operasi*. In *Manajemen Operasi* (pp. 1–59). Universitas Terbuka. <http://lingkarism.com/manajemen-operasional-danstrategi-operasional/>
- Arifah, N. (2015). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Batik Tulis di Kabupaten Kebumen*. Universitas Diponegoro.
- Bappeda. (2021). *Profil 2021*. 1–52.
- Brown, R. D. dan G. J. Petrello. 1976. *Introduction to Business, An Integration Approach*. Beverly Hills:Glen Coe Press.
- Creswell, John. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dani Danuar Tri U. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang*: Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Universitas Diponegoro Semarang
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Derah Jakarta*. Jakarta Bakrie School of Management
- Fattih. 2014. *Pengertian Pemerintah dan Menurut Para Ahli*. 13 Juni 2014. <http://fatih-io.blz/>

- Moleong J.Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset.
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustafa, Badriani. 2021. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidrap*. Universitas Hasanuddin, Indonesia.
- Nuramelia.2014.Defenisi pemerintah dan pemerintahan. Jakarta [https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah dan pemerintahan/](https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/)
- Prastika, H. C. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan*. Universitas Airlangga.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.
- Sedarmayanti. (2004), *Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Sitio, V. S. S. (n.d.). *Modul Manajemen Operasional*.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soejito, Irawan. 2008, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Verawati, Tuti A., 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Universitas 45 Makassar
- Wuryandani Dewi & Hilma Meilani. 2013. *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah*

Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta

Yusuf, Iyas. 2014. *Peran dan fungsi pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat.* ([http://www. Iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan fungsi-pemerintahan-dalam-html](http://www.Iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam-html))

Web :

<https://bappeda.jogjakota.go.id/> diakses pada tanggal 18 Januari 2022

<http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/> diakses pada tanggal 17 Februari 2022

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UM>

M. Pdf diakses pada tanggal 20 Februari 2022

Suryana, W. (2018). *Pemkot Yogyakarta Luncurkan Program Gandeng Gendong.*
<https://www.republika.co.id/berita/p6yo5a423/pemkot-yogyakartaluncurkan-program-gandeng-gendong>

Undang-Undang :

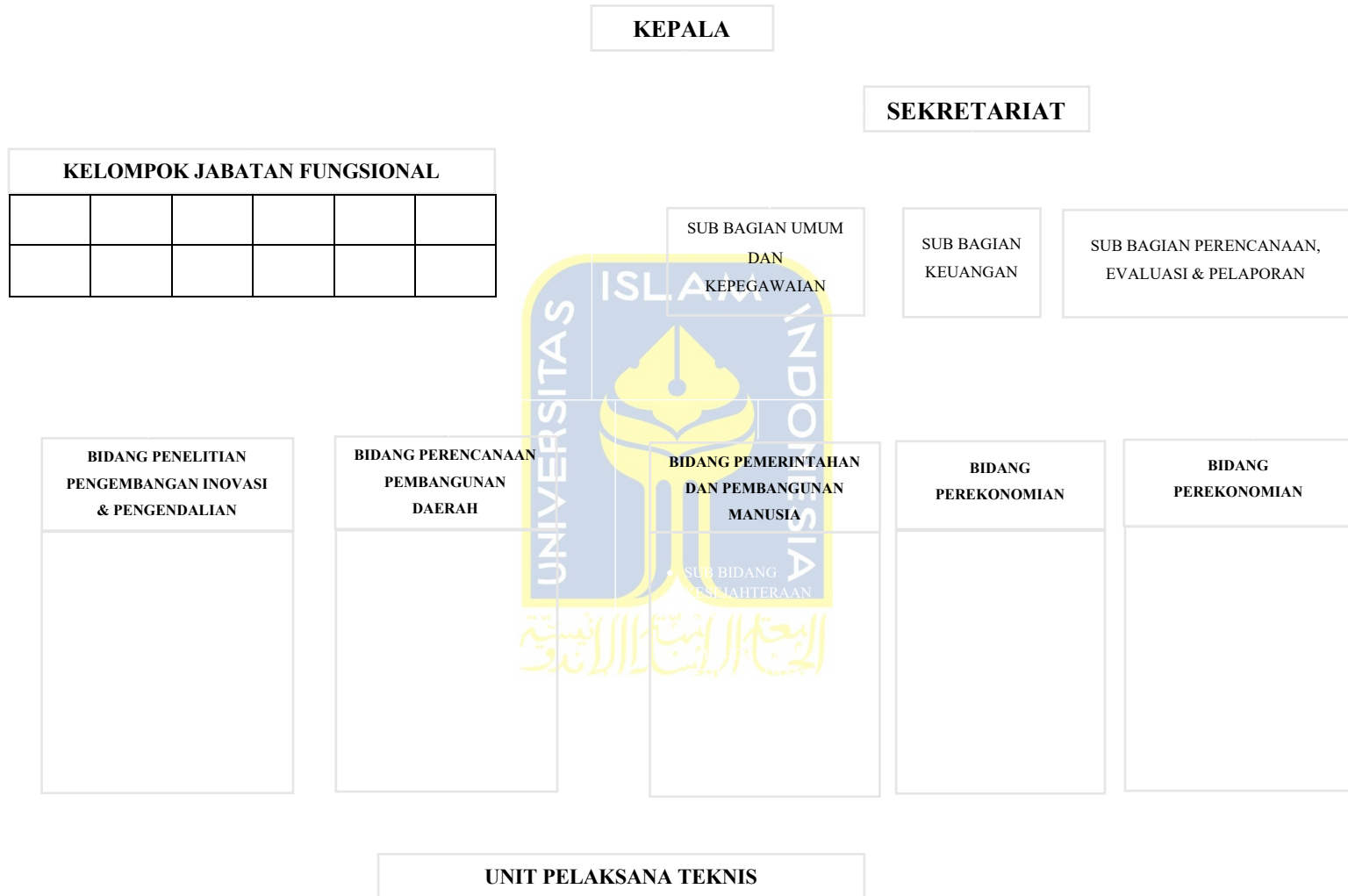
UU No23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 68 Tahun 2015

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Struktur Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta



LAMPIRAN II Surat Permohonan Ijin Magang



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 2098/WD2/10/Div.URT/IX/2021
Hal : Permohonan Ijin Magang

Kepada Yth
Pimpinan
Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55152

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia adalah institusi pendidikan yang memiliki tujuan menciptakan lulusan profesional di bidangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak atau Ibu memberikan ijin mahasiswa kami dalam melaksanakan magang di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Ichwan Mastito Hermawan
NIM : 18311064
Alamat : Pr. Karang Baru No.16 Mojayan Klaten Tengah
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten / 05 Juli 2000
Program Studi : Manajemen
Jenjang : Strata I (S1)
Periode Magang : 1 Oktober 2021 - 1 Februari 2022

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

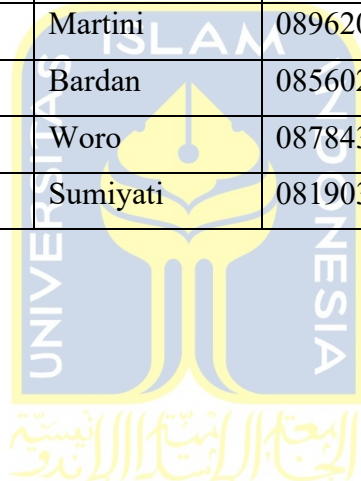
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 10 September 2021
Wakil Dekan Bidang Keagamaan,
Kampus Mahasiswa, dan Alumni,



LAMPIRAN III Daftar Nama Kelompok UMKM

No.	Nama Kelompok	Koordinator	Kontak	Kelurahan	Kemantren
1	Melati	Iis Siti	081392503886	Giwangan	Umbulharjo
2	Barokah	Windarsih	08995734599	Giwangan	Umbulharjo
3	Sidikan Raya	Purwani	085786585557	Pandeyan	Umbulharjo
4	PSA	Nur Cahayati	085228077310	Pandeyan	Umbulharjo
5	Pandan Wangi	Suginah	085643126773	Pandeyan	Umbulharjo
6	Teratai Food	Winda	085246769750	Prenggan	Kotagede
7	UPPKS Ceria	Martini	089620957535	Prenggan	Kotagede
8	Agro 12	Bardan	085602671176	Rejowinangun	Kotagede
9	Sanggabuwana	Woro	087843301717	Rejowinangun	Kotagede
10	Srikandi	Sumiyati	081903888553	Mataram	Kotagede



LAMPIRAN IV Dokumentasi Wawancara & Observasi



- 1) Wawancara dengan Ibu Iis Siti Sutiani selaku pemilik UMKM bernama “Melati Giwangan” di Kemantren Umbulharjo



- 2) Wawancara dengan Ibu Purwani Prihatin Y selaku pemilik UMKM bernama “Sidikan Raya Pandeyan” di Kemantren Umbulharjo



- 3) Wawancara dengan Ibu Windarsih selaku pemilik UMKM bernama “Barokah Giwangan” di Kemantren Umbulharjo



- 4) Wawancara dengan Ibu Suginah selaku pemilik UMKM bernama “Pandan Wangi Pandeyan” di Kemantren Umbulharjo



- 5) Wawancara dengan Bapak Badran Alkhuri selaku pemilik UMKM bernama “Agro 12 Rejowinangun” di Kemantren Kotagede



- 6) Wawancara dengan Ibu Martini selaku pemilik UMKM bernama “UPPKS Ceria Prenggan” di Kemantren Kotagede



- 7) Wawancara dengan Ibu Worodarmini selaku pemilik UMKM bernama “Sanggabuwana” di Kemantren Kotagede



8) Wawancara dengan Ibu Winda Titi Pratiwi selaku pemilik UMKM bernama “Teratai Food Prenggan” di Kemantren Kotagede



9) Wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku pemilik UMKM bernama “Srikandi Mataram” di Kemantren Kotagede

